

STRATEGI DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA MELALUI PACIFIC ELEVATION TAHUN 2019

Evelin Annastasya Lufti¹, Chairul Aftah²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Abstrak

Hubungan antara Indonesia dengan Negara Kawasan Pasifik Selatan cukup kompleks, hal ini tentunya berkaitan dengan kemerdekaan wilayah Papua. Dukungan yang diberikan terlihat dalam pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB, sebagian dari Negara – negara Pasifik Selatan kerap kali membawa isu mengenai Papua. Mengatasi hal tersebut, Indonesia kemudian melakukan suatu pendekatan ke Negara – negara Pasifik, hal ini bertujuan untuk meredam dukungan yang diberikan dalam memerdekakan Papua. Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu serta mendeskripsikan strategi pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menggunakan teori diplomasi ekonomi dari Kishan S. Rana dan teori diplomasi budaya oleh Simon Mark serta konsep bantuan luar negeri oleh K.J Holsti. Hasil dari penelitian ini adalah dalam strategi Pacific Elevation, Pemerintah Indonesia menggunakan instrument diplomasi ekonomi, budaya serta memberikan bantuan luar negeri.

Kata Kunci: *Pacific Elevation*, Diplomasi, Bantuan Luar Negeri, Pasifik Selatan, Indonesia

Abstract

The relationship between Indonesia and the South Pacific countries is quite complex and certainly related to the independence of the Papua region. This support is evident in the United Nations General Assembly, where some South Pacific countries frequently raise the issue of Papua. In response, Indonesia has approached the Pacific countries with the aim of reducing their support for Papuan independence. This study uses Kishan S. Rana's theory of economic diplomacy, Simon Mark's theory of cultural diplomacy, and K. J. Holsti's concept of foreign aid to identify and describe the strategies employed by the Indonesian government. Findings indicate that, in the Pacific Elevation Strategy, the Indonesian government uses economic and cultural diplomatic instruments and provides foreign aid.

Keywords: *Pacific elevation, diplomacy, foreign aid, South Pacific, Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Kawasan Pasifik Selatan, yang berbatasan langsung dengan Papua Barat, terdiri atas berbagai negara kepulauan seperti Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini, dengan populasi didominasi oleh etnis Melanesia (92,7%). Secara geografis, kawasan ini memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan Samudra Hindia-Pasifik, menjadikannya arena persaingan kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain kaya akan sumber daya alam, seperti perikanan,

pertambangan, dan pariwisata, kawasan ini juga rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, sehingga sering kali Negara – negara Pasifik Selatan menerima bantuan internasional.

Indonesia, meskipun tergolong ke dalam kawasan Asia Tenggara, akan tetapi memiliki keterkaitan budaya dan geografis dengan Pasifik melalui lima provinsi timurnya. Namun, hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan menghadapi tantangan serius akibat dari dukungan beberapa negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon terhadap gerakan separatisme Papua di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (CNN Indonesia, 2021; Sabir, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan sebuah pendekatan yang disebut dengan *Pacific Elevation* (2019) yang bertujuan memperkuat hubungan antara Indonesia dengan negara – negara Pasifik Selatan untuk meredam dukungan terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Strategi ini mencakup peningkatan kerja sama ekonomi, budaya, dan politik, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai bagian integral dari kawasan Pasifik.

Permasalahan utama penelitian ini adalah meningkatnya internasionalisasi isu Papua oleh negara-negara Pasifik Selatan yang memanfaatkan kesamaan etnis Melanesia dan isu HAM (Asmara, 2024). Dukungan ini tidak hanya mengancam kedaulatan Indonesia tetapi juga mempengaruhi dinamika hubungan regional. Sebagai respon, pemerintah Indonesia meluncurkan strategi *Pacific Elevation* dengan pendekatan Diplomasi ekonomi, budaya, serta pemberian bantuan luar negeri

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *Pacific Elevation* yang diterapkan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan diplomasi di Pasifik Selatan, khususnya terkait isu separatisme Papua. Fokus utama penelitian adalah mendeskripsikan tiga bentuk pendekatan utama dalam strategi ini: (1) diplomasi ekonomi (2) diplomasi budaya (3) bantuan luar negeri.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Strategi Diplomasi Pemerintah Indonesia melalui *Pacific Elevation* tahun 2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan fokus penelitian adalah Strategi *Pacific Elevation* tahun 2019 - 2024.

Landasan Konsep

Diplomasi Ekonomi

Dalam melakukan pendekatan ke negara – negara Kawasan Pasifik Selatan, Pemerintah Indonesia menggunakan strategi diplomasi ekonomi. Penggunaan diplomasi ekonomi termasuk ke dalam salah satu prioritas utama yang ada di dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Yoshida, 2023).

Kishan S. Rana (2007) mengemukakan, diplomasi ekonomi merupakan sebuah proses negara untuk saling berinteraksi atau berhubungan dengan negara lain dalam usahanya mencapai tujuan nasional negara dengan melakukan berbagai bentuk kegiatan, seperti kegiatan perdagangan dan investasi. Rana kemudian membagi ke dalam 4 tahapan diplomasi ekonomi pada negara berkembang, yaitu:

1. *Economic Salesmanship*

Negara biasanya mengirimkan utusan seperti duta besar atau diplomat ke negara tujuan. Penggunaan *salesmanship* dapat dipahami sebagai orang yang melakukan penawaran produk atau menjual produk kepada masyarakat tertentu. *Economic Salesmanship* menjadi fase awal dalam praktik diplomasi ekonomi, hal ini dikarenakan kegiatan ini dapat memberikan peluang ekonomi baik dalam bidang perdagangan maupun investasi.

2. *Economic Networking*

Setelah melakukan kegiatan promosi, negara akan melakukan kemitraan baik antar instansi pemerintah ataupun dengan pihak swasta.

3. *Image Building*

Fase ini dilakukan oleh negara untuk membangun citra reputasi dan citra negara yang baik di pasar global.

4. *Regulatory Management*,

Sejumlah kegiatan pada fase ini antara lain melakukan negosiasi perjanjian perdagangan dan perjanjian perluasan

Diplomasi Budaya

Selain dari penggunaan instrument ekonomi, pendekatan diplomasi Indonesia ke negara – negara Pasifik Selatan juga menggunakan instrument budaya. Menurut J. Michael Waller (2007), dalam bukunya yang berjudul “*The Public Diplomacy Reader*” memberikan definisi diplomasi budaya sebagai sebuah kegiatan pertukaran yang berupa informasi, gagasan, bahasa, seni, serta aspek budaya lainnya dengan tujuan untuk menciptakan kepentingan bersama. Pada akhirnya, tujuan dari pelaksanaan diplomasi budaya adalah untuk mempengaruhi *foreign audience* (Kharutanada, 2019).

Simon Mark (2009) mengemukakan bahwa dapat dikategorikan sebagai upaya diplomasi budaya apabila memenuhi keempat elemen dasar diplomasi budaya, adapun elemen yang dimaksudnya yakni;

1. Keterlibatan aktor dan Pemerintah

Dalam pelaksanaan diplomasi budaya, tentunya harus melibatkan aktor dan pemerintah, hal ini tentunya memiliki tujuan untuk memproyeksikan citra positif bangsa di luar negeri

2. Tujuan

Secara idealis tujuan pelaksanaan diplomasi budaya untuk mencegah konflik, memperkuat *mutual understanding*, mengurangi stereotip dan etnosentrisme. Sedangkan secara fungsionalis adalah untuk meningkatkan perdagangan negara, perekonomian, mempererat hubungan bilateral, multilateral, dan regional, serta kepentingan politik.

3. Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu acara ataupun program kebudayaan, dibutuhkan adanya kegiatan sehingga acara atau program tersebut dapat terlaksana. Kegiatan tersebut kemudian terbagi menjadi tiga jenis yaitu, Festival, Pameran (*workshop*), serta pendidikan atau pertukaran budaya.

4. Sasaran

Sasaran atau *audiences* merupakan kelompok sasaran yang menerima representasi budaya dari negara yang melakukan diplomasi.

Bantuan Luar Negeri

Secara Umum bantuan luar negeri didefinisikan sebagai transfer atau tindakan memberikan bantuan sumber daya yang meliputi pemberian barang, pengetahuan teknis, dana hibah, dan yang lainnya yang diberikan oleh suatu negara kepada negara tujuan atau penerima.

K.J Holsti (1992) dalam bukunya *International Politics: A Framework for Analysis* memaknai bantuan luar negeri sebagai transfer uang, jasa, teknologi, serta nasihat-nasihat teknis dari negara pemberi (donor) kepada negara penerima yang merupakan bagian dari instrument kebijakan dalam hubungan internasional. Dalam bukunya tersebut, Hoslti juga membagi empat utama bantuan luar negeri, yakni:

1. *Technical Assistance*/bantuan teknis

Bertujuan untuk memberikan dukungan proyek dalam skema berupa penyediaan tenaga ahli ataupun konsultan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu.

2. *Grants*/hibah

Bantuan ini sama dengan pinjaman yang diberikan untuk membantu proyek pembangunan, tetapi dananya tidak perlu dikembalikan ke negara pemberi (donor)

3. Pinjaman Pembangunan

Bantuan yang diberikan merupakan bantuan keuangan untuk mendukung pembangunan yang fokusnya untuk mementaskan kemiskinan jangka panjang

4. Bantuan Kemanusiaan

Bantuan darurat yang diberikan kepada negara penerima yang mengalami kendala seperti konflik ataupun bencana alam

3. HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA KAWASAN PASIFIK SELATAN

Pasifik Selatan merupakan salah satu kawasan yang letaknya dekat dengan Indonesia. Secara historis, hubungan antara Indonesia dengan negara – negara

yang berada di Kepulauan Pasifik Selatan dimulai pada tahun 1970-an, Fiji menjadi negara Kawasan Pasifik Selatan pertama yang menjalin hubungan dengan Indonesia tepatnya pada tahun 1974, ditandai dengan penandatanganan *MoU* yang kemudian berlanjut dengan pembukaan masing – masing kedutaan besar (Zsahwa, 2018).

Setelah menjalin hubungan dengan Fiji, di tahun – tahun berikutnya Indonesia pun membuka hubungan diplomatik dengan Papua Nugini tahun 1975, Kepulauan Solomon tahun 1983, Vanuatu tahun 1995, Tonga tahun 1994, Samoa tahun 1978, Kepulauan Marshall tahun 1993, Mikronesia tahun 1991, Palau tahun 2007, Tuvalu tahun 2012, Nauru tahun 2012, dan Kiribati pada tahun 2013.

Hingga saat ini, Indonesia telah berhasil memiliki hubungan diplomatik dengan 16 negara Kawasan Pasifik, termasuk Fiji, Selandia Baru, Australia, Vanuatu, Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Kiribati, Samoa, Tonga, Kepulauan Marshal, Palau, dan Negara Federasi Mikronesia. Tahun 2019 lalu, pada saat penyelenggaraan *Pacific Exposition* tahun 2019 Indonesia secara resmi juga telah membuka hubungan diplomatik dengan Kepulauan Cook dan Niue (Wati, et all 2021).

Hubungan yang dibangun oleh Indonesia dengan negara – negara Kawasan Pasifik Selatan tentunya tidak hanya sebatas membangun hubungan diplomatik dengan negara – negara saja, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam forum – forum regional Pasifik, seperti: Melanesian Spearhead Group (MSG), South West Pacific Dialogue (SPWD), Pacific Island Forum, Pacific Island Development Forum (PIDF), Southwest Pacific Dialogue dan Coral Triangle Initiative on Coral, Reefs, Fisheries and Food Security (Buiney, 2024).

ISU SEPARATISME PAPUA

Secara konstitusional, Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau *Act of Free Choice* tahun 1969 yang kemudian diakui oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) melalui proses resolusi PBB No.2504. Berdasarkan analisis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam PRM atau *Papua Road Map* terdapat empat isu yang menjadi sumber utama terjadinya konflik Papua, yaitu: (1) Marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua, (2) Kegagalan pembangunan ekonomi yang tidak menyertakan aspek social-budaya, (3)

Kekerasan dan pelanggaran HAM oleh negara, dan (4) Perbedaan persepsi dalam konstruksi sejarah pengintergrasian Papua ke Indonesia tahun 1969 (Kurnianto, 2022).

isu Papua merupakan permasalahan domestik Indonesia. Namun isu Papua mengalami proses internasionalisasi yang menarik perhatian negara – negara sekitar terutama Negara Kepulauan Pasifik yang mengecam Pemerintah Indonesia untuk memerdekakan Papua. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia merupakan suatu upaya untuk menjaga kedaulatan wilayah Papua dan membangun hubungan baik dengan dengan negara yang berada di Kawasan Pasifik Selatan.

PACIFIC ELEVATION

Pada 19 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru, Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan strategi *Pacific Elevation* melalui Kementerian Luar Negeri. Menteri Retno Marsudi menegaskan bahwa inisiatif ini menandai "era baru kemitraan" Indonesia dengan negara-negara Pasifik, didasarkan pada kedekatan geografis, kesamaan etnis Melanesia, dan potensi kerja sama budaya (Andrea, 2021; Wati et al., 2021). Beberapa negara Pasifik, seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon, secara konsisten mendukung gerakan kemerdekaan Papua di forum-forum internasional, termasuk PBB. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan, analisis akademis mengidentifikasi bahwa strategi ini tidak hanya bertujuan memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga merupakan respons terhadap dukungan beberapa negara Pasifik terhadap gerakan kemerdekaan Papua di forum internasional (Wati, 2021). *Pacific Elevation* diimplementasikan melalui dua pendekatan utama: (1) diplomasi intensif (baik bilateral maupun multilateral) dan (2) pemberian bantuan. Strategi ini bertujuan ganda: untuk meredam dukungan internasional terhadap separatisme Papua sekaligus membangun citra positif Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Pasifik Selatan.

STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA MELALUI PACIFIC ELEVATION

DIPLOMASI EKONOMI PACIFIC ELEVATION

Pelaksanaan strategi *Pacific Elevation* oleh Pemerintah Indonesia menemukan bentuk konkretnya dalam *Pacific Exposition*, sebuah inisiatif diplomasi

ekonomi berskala regional yang diselenggarakan selama dua kali, yang pertama kali pada 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru. Acara yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Wellington ini menandai babak baru dalam pendekatan Indonesia terhadap kawasan Pasifik, dengan mengusung tema "*Creating Pacific Momentum*". Pada pelaksanaan *Pacific Exposition* pertama terdapat sebanyak 19 negara dan wilayah Pasifik berpartisipasi, termasuk aktor-aktor kunci seperti Indonesia, Papua Nugini, Fiji, Australia, dan Polinesia Prancis, yang terlibat dalam pameran dagang (*trade fair*) menyangkut berbagai sektor unggulan.

Pacific Exposition berfungsi sebagai platform multi-dimensi yang tidak hanya memfasilitasi transaksi komersial tetapi juga membangun jaringan strategis. Data resmi menunjukkan bahwa acara ini berhasil menarik partisipasi 123 perusahaan, termasuk BUMN Indonesia dan pelaku usaha dari negara-negara Pasifik, dengan total transaksi mencapai NZD 104 juta (setara USD 70 juta). Sektor-sektor yang mendominasi mencakup perikanan (tuna beku dan segar), komoditas pertanian (kopi, cengkeh, pala), serta produk kerajinan berbasis rotan.

Pemilihan Selandia Baru sebagai lokasi penyelenggaraan bukanlah kebetulan, melainkan keputusan strategis yang didasarkan pada tiga pertimbangan utama:

1. **Posisi Geostrategis:** Selandia Baru berfungsi sebagai *hub* ekonomi dan budaya di Pasifik Selatan, sekaligus gerbang masuk ke pasar regional (Bernadette et al., 2022).
2. **Pertimbangan Politik:** Sebagai anggota *Pacific Islands Forum* (PIF) yang berpengaruh, Selandia Baru dapat menjadi mediator dalam meredakan ketegangan terkait isu Papua (Wardhani, 2018).
3. **Faktor Demografis:** Populasi diaspora Pasifik yang signifikan di Selandia Baru menciptakan peluang untuk diplomasi

Setelah keberhasilan acara *Pacific Exposition* yang pertama, Pemerintah Indonesia kembali melaksanakan *Pacific Exposition* ke-dua pada 27 – 30 Oktober tahun 2021 dengan tema "*It's Pacific Time*" yang digelar secara virtual karena terkendala oleh COVID-19. terdapat 17 negara yang berpartisipasi yakni, Selandia

Baru, Australia, Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Cook, Australia, Nauru, Kaledonia Baru, Timor Leste, Samoa, Palau, Tuvalu, Niue, Kepulauan Solomon, Tonga, French Polynesia, Kiribati. Walaupun digelar secara virtual, pada *Pacific Exposition* yang ke-dua ini, Indonesia mampu memperoleh transaksi bisnis sebesar 104 juta USD atau Rp1,48 triliun melalui kegiatan interaksi bisnis dan business matching, pendapatan tersebut mengalami peningkatan sebesar 48 persen dibandingkan dari pelaksanaan *Pacific Exposition* yang pertama pada tahun 2019. Secara teoritis, implementasi *Pacific Exposition* dapat dianalisis melalui lensa *Economic Diplomacy* karya Kishan S. Rana (2004, 2007).

Rana mengidentifikasi empat tahapan diplomasi ekonomi negara berkembang, di mana Indonesia telah mengimplementasikan dua tahap utama:

1. *Economic Salesmanship*

Tahap ini terwujud melalui peran aktif KBRI Wellington dan Duta Besar Tantowi Yahya dalam mempromosikan produk-produk Indonesia. Kolaborasi lintas kementerian—melibatkan Kemenlu, Kemenperin, BKPM, dan KADIN—memperkuat pendekatan dalam diplomasi ekonomi.

2. *Networking*

Mekanisme *business matching* yang difasilitasi Kementerian Perdagangan berhasil mencatatkan peningkatan transaksi sebesar 48% pada *Pacific Exposition* kedua (2021), mencapai USD 104 juta. Partisipasi 17 negara—termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang kritis terhadap Indonesia—menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam membangun *economic interdependence*.

DIPLOMASI BUDAYA PACIFIC ELEVATION

Strategi *Pacific Elevation* Indonesia tidak hanya mengandalkan instrumen ekonomi, tetapi juga memanfaatkan diplomasi budaya sebagai pendekatan komplementer. Kedekatan etnokultural antara masyarakat Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT) dengan negara-negara Pasifik—khususnya kelompok Melanesia—menjadi landasan strategis dalam

membangun *cultural connectivity*. Implementasinya tercermin dalam *Pacific Exposition* melalui tiga bentuk utama:

1. Pertunjukan Budaya

Penabuhan *tifa* sebagai pembukaan acara berfungsi sebagai simbol pembukaan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa Indonesia memiliki kesamaan karakteristik dengan komunitas Pasifik, mengingat alat musik ini memiliki makna spiritual dan sosial yang paralel dalam budaya Melanesia (Hanafi, 2023; Rai, 2020). Kolaborasi musik "*Sound of the Pacific*" yang melibatkan musisi Indonesia (Glenn Fredly) dan seniman Pasifik (Samoa, Tonga) menegaskan narasi *cultural hybridity*.

2. Forum Kebudayaan

Pacific Cultural Forum menjadi sebuah platform diskusi warisan budaya bersama, termasuk inisiatif nominasi UNESCO untuk pengakuan internasional. Forum ini memperkuat *soft power* Indonesia melalui pendekatan akademik dan pertukaran pengetahuan.

3. Program Berkelanjutan

Inisiatif "*Harmony for the Pacific*" (2024) di Fiji dan Indonesia—melalui residensi seniman, pameran *wastra* Sumba, dan pertunjukan kolaboratif—menunjukkan komitmen jangka panjang antara Indonesia dengan Pasifik

Analisis berdasarkan kerangka Simon Mark (2009) mengungkap empat elemen kunci:

- **Aktor:** Keterlibatan multipihak (pemerintah, seniman, komunitas lokal)
- **Tujuan:** Melalui budaya sebagai instrument diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat Pasifik, bahwa Indonesia merupakan bagian dari Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak melakukan penjajahan kepada masyarakat Papua seperti yang terlihat.
- **Kegiatan:** Integrasi unsur budaya dalam agenda ekonomi (*business matching* dengan pertunjukan seni).

- **Audiens:** Target ganda meliputi elite politik Pasifik dan diaspora yang berada di Kawasan Pasifik

Secara teoretis, praktik ini sejalan dengan konsep Waller (2007) tentang diplomasi budaya sebagai sebuah tindakan untuk meningkatkan pemahaman bersama atau *mutual understanding*, dengan keunikan pada pemanfaatan ikatan kekerabatan Melanesia. Temuan ini memperkaya diskusi akademis tentang peran *cultural* dalam diplomasi kawasan, khususnya untuk negara berkembang dengan kompleksitas geopolitik seperti Indonesia.

BANTUAN LUAR NEGERI

Pemerintah Indonesia menerapkan strategi *Pacific Elevation* dengan memberikan bantuan kepada negara-negara di kawasan Pasifik. Meskipun Indonesia masih menerima bantuan dari negara-negara donor seperti Amerika Serikat dan Australia, Indonesia juga aktif memberikan bantuan melalui program *Indonesia AID*. Hal ini mencerminkan politik luar negeri bebas aktif yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, yang bertujuan untuk mendukung ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia AID, yang diresmikan pada 18 Oktober 2019, merupakan inisiatif mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. *Indonesia AID* dikelola oleh empat kementerian: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas (Aryani & Hapsari, 2021). Bantuan tersebut mencakup dana hibah, infrastruktur, dan dukungan kemanusiaan, yang menjadi bagian dari strategi *Pacific Elevation*.

Melalui *Indonesia AID*, pemerintah Indonesia memberikan berbagai bentuk bantuan kepada negara-negara Pasifik. Pada 2019, Indonesia menyumbang 1 juta USD kepada Palau untuk mendukung *Our Ocean Conference* dan membiayai pembangunan stadion multifungsi (*Friendship Hall*) di Kepulauan Solomon senilai Rp112,5 miliar. Bantuan kesehatan juga disalurkan, termasuk kapal ambulans untuk Timor Leste dan renovasi rumah sakit di Papua Nugini. Selain itu, Indonesia

memberikan respons kemanusiaan saat bencana, seperti bantuan Rp20,77 miliar untuk rekonstruksi sekolah di Fiji (2020), Rp17,6 miliar untuk Vanuatu (2023), dan Rp17 miliar untuk Papua Nugini pascatanah longsor (2024).

Menurut Holsti (1992), bantuan luar negeri mencakup transfer sumber daya finansial, barang, dan keahlian teknis. Dalam konteks ini, *Indonesia AID* berfokus pada hibah pembangunan dan bantuan kemanusiaan, yang berperan sebagai instrumen *soft power* diplomasi Indonesia. Efektivitas strategi *Pacific Elevation* terlihat dari minimnya pembahasan isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB (2022–2023) serta terjalinnya hubungan diplomatik dengan Kepulauan Cook dan Niue (2019). Namun, dukungan beberapa negara Pasifik terhadap isu Papua menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, *Indonesia AID* berfungsi sebagai alat kebijakan luar negeri untuk memperkuat pengaruh politik, ekonomi, dan reputasi Indonesia di kawasan Pasifik.

4. KESIMPULAN

Kawasan Pasifik Selatan memegang peran strategis bagi Indonesia, terutama menyusul dukungan beberapa negara di kawasan tersebut terhadap kemerdekaan Papua dan kritiknya terhadap Indonesia dalam forum-forum internasional seperti Sidang Umum PBB. Sebagai respons, Pemerintah Indonesia menginisiasi strategi *Pacific Elevation*, yang bertujuan mempererat hubungan melalui instrumen diplomasi dan bantuan luar negeri. Salah satu bentuk diplomasi ekonomi dalam strategi ini adalah *Pacific Exposition*, sebuah pameran dagang, investasi, dan pariwisata untuk mempromosikan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Pasifik. Selain aspek ekonomi, kegiatan ini juga mencakup diplomasi budaya melalui acara *Harmony for the Pacific*. Lebih lanjut, Indonesia memberikan bantuan pembangunan (*Indonesian Aid*) kepada negara-negara di kawasan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pengaruh dan memperbaiki citra di kancah regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, D. S. (2024). Optimalisasi Diplomasi Indonesia dalam Internasionalisasi Isu Papua Guna Menjaga Stabilitas Nasional. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
- Aryani, M.I. and Hapsari, R.D. (2021). Foreign Aid for Alliance: Indonesia's Effort to Find Support in the South Pacific Region. *JOSAR (Journal of Students*

- Academic Research), 6(3), pp.418–429.
doi:<https://doi.org/10.35457/josar.v7i1.1544>.
- Bernadette, S., Septiana, R. and Kusumawardhana, I. (2022). Music Matters: Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Negara di Kawasan Pasifik Melalui ‘the Symphony of Friendship’ di Selandia Baru. *Indonesian Perspective*, [online] 7(2), pp.205–227. Available at: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/50779/22704>.
- Buiney, M. E. . and Wambrauw, M. S. F. . (2024) “Indonesia’s Interests in the Pacific Region”, *Jurnal Multidisiplin Madani*, 4(3), pp. 376–390. doi: 10.55927/mudima.v4i3.8028.
- Maulana, M. I. and Hanafi, M. R. (2023) “Aktualisasi Sumber Daya Soft Power Indonesia di Kawasan Oseania dalam Pacific Exposition 2019”, *Sospol*, 9(1), pp. 98–113. doi: 10.22219/jurnalsospol.v9i1.25490
- Utama, P. A., T.A.K.P.S. (2022). Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), p.8. doi:<https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.356>.
- Maula, Z. (2018) “Analisis Kepentingan Indonesia Dalam Penandatanganan Kerjasama Pertahanan Dengan Fiji Tahun 2017”
- Nugrahantya, S. A. (2021) “*Pacific Elevation ‘Engagement’* : Strategi Indonesia Terhadap Negara – Negara Di Kawasan Pasifik Selatan Dalam Menghentikan Gerakan Separatis Di Papua Barat”
- Rai, I. W. (2020). TIFA DI TANAH PAPUA DALAM PERSPEKTIF ETNOMUSIKOLOGI. *Jurnal Arkeologi Papua*, 12(2), 115–132
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), p.91. doi:<https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.8679>.
- Wati, V.O., Apresian, S.R. and Dewi, E.A.S. (2021). Indonesia’s Foreign Policy in Pacific Island Countries during Joko Widodo Era 2014-2019: An Adaptive Action? *Jurnal Global & Strategis*, 15(1), p.1. doi:<https://doi.org/10.20473/jgs.15.1.2021.1-24>.
- Wardhani, B. (2018) *Kajian Asia Pasifik: Politik Regionalisme dan Perlindungan Manusia di Pasifik Selatan*
- Yoshida, H. Y. and Kriswandwitanaya, F. M. (2023). STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MEMAJUKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL MELALUI KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM FORUM G-20 TAHUN 2022. *Global Mind*, 5(1), pp.1–12. doi:<https://doi.org/10.53675/jgm.v5i1.1063>.